

DAYA DUKUNG SOSIAL WILAYAH PINGGIRAN (STUDI KASUS KELURAHAN TUNGGULWULUNG DAN DESA TEGALGONDO)

Istifada A. Sibyan, Surjono, Mustika Anggraeni

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono 167, Malang 65145, Indonesia, Telp. (0341) 587710
Istifadapwk08@gmail.com

ABSTRAK

Perpindahan masyarakat kota menuju wilayah pinggiran pada umumnya diikuti pembangunan perumahan oleh developer, namun pembangunan perumahan oleh developer di wilayah pinggiran tidak memperhatikan aspek sosial sehingga muncul isu konflik sosial dan daya dukung sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo, daya dukung sosial dan perbedaan serta memberikan rekomendasi terkait daya dukung sosial tersebut. Daya dukung sosial diukur dari tingkat toleransi masyarakat terhadap beberapa parameter daya dukung sosial, yaitu penggunaan lahan, sarana, prasarana, kependudukan, konflik sosial, kelembagaan, adat budaya, ketenagakerjaan dan pendapatan. Pengukuran toleransi dilakukan melalui analisis sebaran frekuensi terhadap jawaban dari kuisioner yang ditunjukkan oleh sebaran frekuensi untuk mengetahui klasifikasi daya dukung sosial dan analisis uji homogenitas untuk mengetahui perbedaan daya dukung dua wilayah tersebut. Daya dukung sosial wilayah pinggiran di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo adalah kategori rendah, oleh karena itu diperlukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan developer dalam mengembangkan wilayah pinggiran terkait pembangunan perumahan.

Keywords: perumahan yang dibangun developer, parameter daya dukung sosial, sebaran frekuensi

ABSTRACT

Migration of population to the suburbs area was often followed by housing developer, however, most housing development in suburbs didn't accommodate social aspects and therefore it caused social conflicts and social carrying capacity became an issue. This study aimed to identify physical, social and economical characters of Tunggulwulung Village and Tegalondo Village; to determine social carrying capacity and its differences; and finally to provide recommendation related to social carrying capacity. Social carrying capacity was measured from the public tolerance that included nine parameters: land use, facilities, infrastructure, population, social conflict, social institution, culture, employment and income. Measurement public tolerance through analysis of answers from questionnaires which shown by frequency distribution that determine classification of social carrying capacity. Homogeneity test was used to distinguish social carrying capacity. Social carrying capacity of both area (Tunggulwulung Village and Tegalondo Village) is low, therefore it needed cooperation between public, government and developer in developing suburbs related to the housing development.

Keywords: housing by developer, social carrying capacity's parameters, frequency distribution

PENDAHULUAN

Perkembangan Kota Malang secara ekonomi yang semakin pesat menuntut perkembangan fisik yang pesat pula. Secara fisik kegiatan ekonomi membutuhkan lahan dan lingkungan yang dapat memberikan nilai ekonomi dan meningkatkan keuntungan. Hal tersebut menyebabkan lahan perkotaan menjadi padat. Kondisi ini menciptakan lingkungan tempat tinggal yang dianggap tidak nyaman oleh masyarakat sehingga masyarakat

cenderung memilih untuk pindah ke wilayah yang memiliki kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan yang lebih rendah daripada wilayah perkotaan. Di sisi lain masyarakat perkotaan masih memiliki kepentingan bekerja di pusat kota sehingga membutuhkan lokasi yang tidak terlalu jauh dari pusat kota sebagai tempat tinggal. Lokasi yang dianggap sesuai untuk dijadikan tempat tinggal bagi masyarakat perkotaan tersebut adalah wilayah pinggiran kota.

Seiring dengan perpindahan masyarakat kota menuju wilayah pinggiran, banyak dibangun perumahan oleh *developer* sebagai salah satu kebutuhan tempat tinggal masyarakat. Namun seringkali pembangunan tersebut tidak mengakomodir aspek sosial sehingga memunculkan berbagai isu sosial termasuk daya dukung sosial. Menurut Inglis *et al.* dalam Yovitner *et al.* (2010:2-3), daya dukung sosial adalah tingkat pembangunan maksimal suatu wilayah yang tidak menimbulkan konflik sosial dan dapat diterima masyarakat yang berarti bahwa hasil pembangunan harus dapat diterima masyarakat.

Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo adalah salah satu wilayah pinggiran yang merupakan wilayah perbatasan antara Kota Malang dengan Kota Batu. Lokasi yang strategis tersebut menjadi daya tarik bagi *developer* untuk mengembangkan perumahan baru bagi masyarakat kota.

Isu-isu yang dihadapi Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo terkait pembangunan perumahan *developer* antara lain adalah adanya rencana pembangunan perumahan oleh *developer* yang menggunakan lahan pertanian dapat mengurangi lapangan kerja bagi petani sekaligus mengurangi lahan terbuka yang berarti juga meningkatkan kepadatan bangunan. Kondisi ini tidak selalu dapat diterima oleh masyarakat sehingga perlu diteliti mengenai tingkat toleransi masyarakat terhadap pembangunan tersebut.

Berbeda dengan studi terdahulu oleh Roussel, S. dan Valette, H. R. (2007) yang meneliti daya dukung sosial kawasan pesisir, penelitian ini bertujuan untuk meneliti daya dukung sosial wilayah pinggiran, tepatnya Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo. Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian adalah dampak tekanan pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan fisik dan sosial. Namun Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo memiliki isu yang lebih spesifik dimana sebagai wilayah pinggiran kota, kedua wilayah tersebut berpotensi untuk dikembangkan dengan segala sumber daya yang dimiliki dan rentan terhadap konflik sosial. Hal tersebut yang mendorong penelitian mengenai daya dukung sosial ini dilakukan.

Di dalam upaya pengembangan Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo sebagai wilayah pinggiran, maka diperlukan kajian daya dukung sosial agar tidak menimbulkan konflik

dan dapat diterima masyarakat. Melalui pengukuran daya dukung sosial di dalam penelitian ini dapat diketahui tingkat toleransi masyarakat terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian diharapkan pengembangan wilayah pinggiran dapat berkelanjutan secara sosial.

Berlatar belakang dari kondisi tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah di dalam penelitian ini yang meliputi karakteristik, daya dukung sosial, perbedaan dan rekomendasi terkait daya dukung sosial Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait daya dukung sosial wilayah pinggiran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik, daya dukung sosial dan perbedaan daya dukung sosial Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo.

METODOLOGI

Berdasarkan teori dan hasil studi yang pernah dilakukan (Thaizong *et al.* 2011 dan Roussel & Valette 2007), dapat ditetapkan beberapa variabel penelitian daya dukung sosial wilayah pinggiran, yaitu kondisi fisik binaan yang meliputi penggunaan lahan, kondisi sarana dan prasarana; kondisi sosial meliputi kependudukan, kelembagaan, konflik sosial dan adat budaya; kondisi ekonomi meliputi pendapatan dan ketenagakerjaan.

Metode penentuan sampel yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Penggunaan *pusposive sampling* pada penelitian ini bertujuan memperoleh informasi mengenai konflik sosial, kelembagaan dan budaya yang ada di wilayah pinggiran sebagai input dalam analisis daya dukung sosial. Anggota sampel dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang mengerti dan memahami konflik sosial yang sedang terjadi di masyarakat sekaligus kelembagaan sosial dan budaya. Setelah wawancara menggunakan sampel yang diperoleh dari *pusposive sampling* maka hasil wawancara dapat menjadi input menyusun kuisioner yang selanjutnya disebar pada masyarakat yang diambil berdasarkan *proportional stratified random sampling*. Anggota sampel penelitian ini terdiri dari masyarakat lokal, pemilik lahan pertanian, petani dan masyarakat pendatang. Dengan demikian pengambilan sampel menggunakan

teknik *proportional stratified random sampling* untuk mendapatkan sampel yang proporsional untuk setiap kelompok sampel.

Tabel 1. Proporsi Sampel Penelitian

Kelurahan /Desa	Jumlah Sample			
	Masyarakat lokal	Masyarakat pendatang	Pemilik lahan	Petani
Tunggulwulung N= 6354; n = 99	N ₁ = 4993 n ₁ = 76	N ₂ = 746 n ₂ = 11	N ₃ = 545 n ₃ = 8	N ₄ = 70 n ₄ = 4
Tegalgon do N= 4396; n = 99	N ₁ = 3611 n ₁ = 81	N ₂ = 165 n ₂ = 5	N ₃ = 295 n ₃ = 6	N ₄ = 325 n ₄ = 7
TOTAL	158	16	14	11

Sumber: Hasil perhitungan 2012

Analisis daya dukung sosial diperoleh dari toleransi masyarakat terhadap parameter daya dukung sosial yang terdiri dari toleransi 1-4 (tidak dapat menerima-sangat dapat menerima). Analisis dilakukan dengan metode sebaran frekuensi untuk mengetahui kelas daya dukung sosial.

Data yang digunakan untuk menentukan pembagian kelas adalah tingkat toleransi dan data untuk menentukan batas kelas adalah jumlah sampel. Nilai frekuensi relatif menunjukkan banyaknya persentase toleransi tertentu sekaligus kelas daya dukung sosial. Klasifikasi daya dukung sosial dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu oleh Peyton *et al* (2007:21) yang membagi kelas daya dukung sosial menjadi 4, yaitu:

Tabel 2. Klasifikasi Daya Dukung Sosial

Daya Dukung Sosial	Keterangan
Sangat rendah	lebih dari 80% toleransi masyarakat menolak (toleransi 1 dan 2)
Rendah	50%-79% toleransi masyarakat menolak (toleransi 1 dan 2)
Sedang	30%-49% toleransi masyarakat menolak (toleransi 1 dan 2)
Tinggi	<29% toleransi masyarakat menolak (toleransi 1 dan 2)

Sumber: Peyton *et al* (2000:21)

Sedangkan perbedaan daya dukung sosial dianalisis dengan metode uji homogenitas. Uji homogenitas menunjukkan nilai signifikansi perbedaan toleransi (p) dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Jika $p > \alpha$, tidak terdapat perbedaan signifikan toleransi dan jika $p < \alpha$, maka terdapat perbedaan signifikan toleransi. Hasil analisis tersebut menjadi input bagi analisis akar masalah dan akar tujuan untuk menentukan rekomendasi terkait daya dukung sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum terjadi perkembangan wilayah Kota Malang ke arah wilayah pinggiran, penggunaan lahan wilayah pinggiran didominasi oleh guna lahan perdesaan terutama lahan pertanian. Namun dengan adanya pembangunan perumahan oleh *developer*, pola penggunaan lahan mulai berubah menjadi perpaduan antara guna lahan perkotaan dan guna lahan perdesaan. Pembangunan perumahan oleh *developer* tidak hanya terlihat dari penggunaan lahan tetapi juga karakteristik fisik lainnya seperti kondisi sarana dan prasarana serta karakteristik sosial dan ekonomi.

Karakteristik Wilayah

Kelurahan Tunggulwulung memiliki luas wilayah 187,90 Ha yang terdiri dari 6 RW dan 43 RT. Sedangkan Desa Tegalgon do memiliki luas wilayah 230,65 Ha yang terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Ketangi, Dusun Gondang, Dusun Wunutsari, Dusun Babatan dan Dusun Dawuhan.

Karakteristik wilayah dalam penelitian ini terdiri dari karakteristik fisik binaan, karakteristik sosial dan karakteristik ekonomi. Karakteristik fisik binaan meliputi kondisi penggunaan lahan, kondisi sarana dan prasarana; karakteristik sosial meliputi kependudukan, kondisi adat budaya, konflik sosial dan kelembagaan sosial; karakteristik ekonomi meliputi kondisi pendapatan dan ketenagakerjaan.

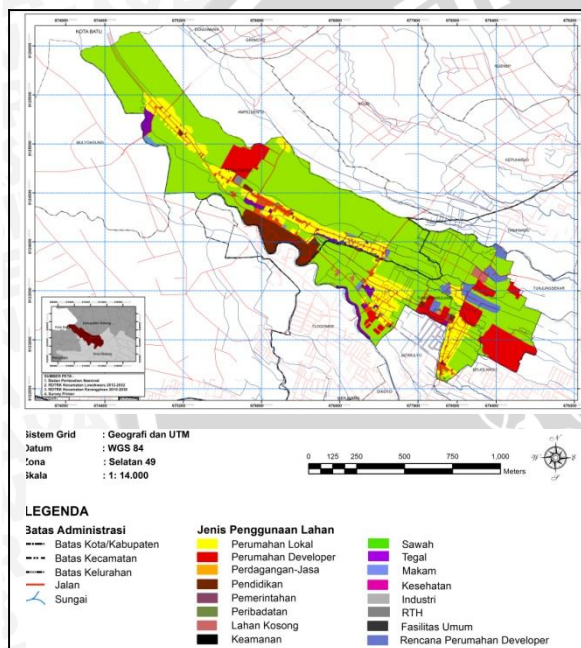
Karakteristik fisik binaan

Lingkungan fisik binaan yang terbentuk di wilayah pinggiran pada umumnya dapat ditunjukkan oleh jenis dan intensitas penggunaan lahan yang terus mengalami perkembangan selama kurun waktu tertentu. Lingkungan fisik binaan dalam penelitian ini adalah penggunaan lahan, sarana dan prasarana.

Berdasarkan RDTRK Kecamatan Lowokwaru 2012-2032 dan RDTRK Kecamatan Karangploso 2010-2030, Penggunaan lahan wilayah pinggiran baik di Kelurahan Tunggulwulung maupun di Desa Tegalgon do didominasi oleh guna lahan pertanian sawah masing-masing seluas 134,76 Ha dan 178,06 Ha pada tahun 2007. Keberadaan lahan sawah tersebut terus berkurang dari tahun 2007-2011 dan beralih menjadi lahan terbangun berupa perumahan yang dibangun oleh *developer* dan sarana permukiman. Perubahan terbesar terjadi pada tahun 2011 dimana lahan sawah Kelurahan

Tunggulwulung berkurang seluas 10,6 Ha dan beralih fungsi menjadi perumahan yang dibangun oleh *developer*. Perkembangan perumahan yang dibangun *developer* di Kelurahan Tunggulwulung terus bertambah hingga tahun 2011 mencapai luas 26,96 Ha atau sebanyak 13 blok perumahan dan 7 blok rencana perumahan. Konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun *developer* di Desa Tegalondo telah terjadi pada tahun 2002 seluas 10,33 Ha.

Keberadaan perumahan yang dibangun oleh *developer* di wilayah pinggiran masih akan bertambah. Hal tersebut ditunjukkan adanya rencana pembangunan perumahan di Kelurahan Tunggulwulung seluas 6,47 Ha dan di Desa Tegalondo seluas 1,12 Ha.



Gambar 1. Peta penggunaan lahan tahun 2011

Perumahan yang dibangun *developer* terdiri dari perumahan eksklusif dan perumahan non eksklusif. Perumahan eksklusif ditandai dengan sistem masuk satu akses yang biasanya berupa satu pintu atau gerbang masuk (Nasution, 2009: 83-88). Selain itu perumahan eksklusif dikelilingi oleh dinding pembatas. Desain perumahan yang eksklusif ternyata menyebabkan masyarakat lokal tidak dapat mengakses perumahan sehingga membatasi interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Dengan demikian *developer* perlu membuat desain perumahan yang tidak membatasi interaksi masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal namun

tetap dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.

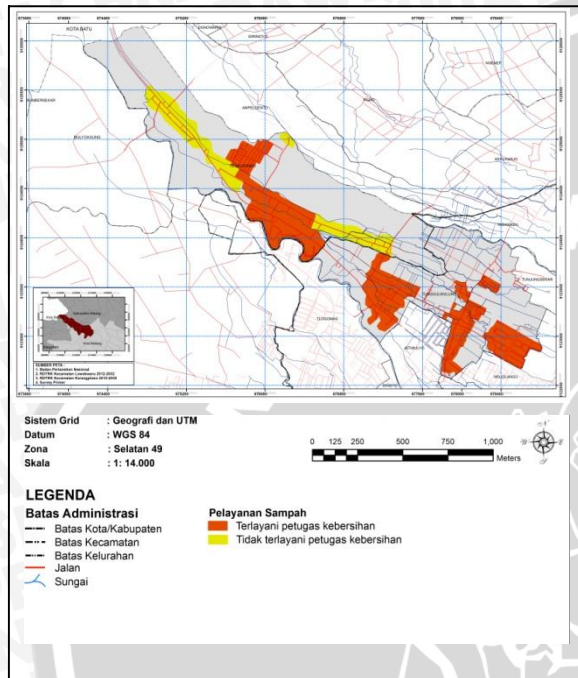
Perkembangan penggunaan lahan yang terjadi di wilayah pinggiran tidak hanya berpengaruh terhadap jenis dan luas guna lahan tetapi juga intensitas penggunaan lahan yang dapat ditunjukkan oleh kepadatan bangunan. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa pada tahun 2011 kepadatan bangunan di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo masing-masing adalah 12 unit/Ha dan 8 unit/Ha.

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa setiap perumahan *developer* di Kelurahan Tunggulwulung harus menyediakan sarana makam yang khusus bagi masyarakat pendatang. Sarana makam tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat perumahan *developer* sehingga masyarakat lokal tidak dapat mengakses sarana makam tersebut. Namun kondisi tersebut tidak menyebabkan masalah karena masyarakat lokal Kelurahan Tunggulwulung telah memiliki sarana makam yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat lokal.

Perumahan yang dibangun *developer* di Desa Tegalondo tidak memiliki sarana khusus, jadi masyarakat pendatang menggunakan sarana desa yang tersedia untuk mendukung aktifitas seperti sarana peribadatan dan sarana olah raga. Keberadaan sarana olah raga berupa lapangan sepak bola di dekat perumahan *developer* ternyata menyebabkan masyarakat lokal kesulitan untuk mengakses sarana olah raga tersebut. Berdasarkan hasil survey wawancara dengan tokoh kunci diketahui bahwa pernah terdapat konflik sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat perumahan lokal terkait penggunaan sarana olah raga. Konflik tersebut berupa pemblokiran lapangan olah raga oleh masyarakat perumahan *developer* yang akan dipergunakan oleh masyarakat lokal dalam rangka kegiatan bersih dusun pada tahun 2011.

Wilayah pinggiran telah terlayani jaringan listrik, jalan dan drainase yang tersebar merata dengan menjangkau seluruh masyarakat. Namun jaringan air bersih, sampah dan sanitasi masih belum merata. jaringan air bersih yang berasal dari PDAM hanya menjangkau perumahan yang dibangun *developer* karena jaringan air bersih disediakan langsung ketika perumahan dibangun, sedangkan masyarakat lokal Kelurahan Tunggulwulung yang terlayani sebanyak 40% dan Desa Tegalondo sebanyak 10%. Masyarakat lokal lebih memilih menggunakan air sumur karena murah.

Demikian pula dengan prasarana sanitasi yang belum merata ditunjukkan oleh 69% masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan 79% masyarakat Desa Tegalondo yang belum memiliki prasarana sanitasi sehingga membuang limbah langsung ke sungai. Sedangkan prasarana sampah telah melayani seluruh masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan sebagian masyarakat Desa Tegalondo.



Gambar 2. Kondisi Pelayanan Sampah

Karakteristik sosial

Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo cenderung meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kelurahan Tunggulwulung sebesar 5,05% per tahun dan Desa Tegalondo 2,48% per tahun. Rata-rata kepadatan penduduk selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2007-2011) di Kelurahan Tunggulwulung adalah 31 jiwa/Ha dan di Desa Tegalondo adalah 19 jiwa/Ha yang tergolong kepadatan sedang. Pertumbuhan penduduk di wilayah pinggiran tidak terlepas dari perpindahan penduduk masuk. Rata-rata jumlah penduduk masuk di Kelurahan Tunggulwulung mencapai 124 jiwa/tahun. Sedangkan di Desa Tegalondo, rata-rata jumlah penduduk masuk mencapai 92 jiwa/tahun.

Salah satu karakter sosial masyarakat wilayah pinggiran yang terbentuk akibat perkembangan wilayah pinggiran adalah adanya masyarakat pendatang dan masyarakat lokal yang berada di dalam satu wilayah dan sistem

sosial yang sama. Kondisi ini seringkali menyebabkan interaksi yang tidak kondusif diantara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. Hal tersebut memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat wilayah pinggiran. berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa konflik sosial yang terjadi di wilayah pinggiran adalah konflik konversi lahan pertanian menjadi perumahan, perbedaan budaya masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, eksklusifitas perumahan yang dibangun *developer* dan keterbatasan akses terhadap sarana.

Kehidupan sosial masyarakat wilayah pinggiran tidak terlepas dari sistem sosial yang melibatkan kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial di wilayah pinggiran terdiri dari lembaga kemasyarakatan dan kelompok kemasyarakatan. Keanggotaan di dalam lembaga kemasyarakatan adalah masyarakat wilayah pinggiran baik masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang. Melalui kelembagaan tersebut masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dapat saling bekerjasama dan menjalin interaksi.

Ditinjau dari aspek budaya, masyarakat lokal dan masyarakat pendatang memiliki adat budaya atau kebiasaan yang berbeda. Sebagian budaya tersebut dapat diterima dan sebagian tidak dapat diterima oleh masyarakat. Berdasarkan survey primer diketahui bahwa bentuk budaya masyarakat lokal yang dapat diterima oleh masyarakat pendatang adalah kegiatan keagamaan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat pendatang selain bertindak dengan dasar rasionalitas tetapi juga dengan dasar norma agama. Bentuk budaya masyarakat lokal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat pendatang adalah budaya bersih desa, upacara kematian dan ziarah ke makam keluarga. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat pendatang bersifat rasional dan tidak mempercayai budaya-budaya tersebut sehingga masyarakat pendatang tidak mengikuti budaya tersebut.

Karakteristik ekonomi

Berdasarkan Kecamatan Lowokwaru dalam Angka, Kecamatan Karangploso dalam Angka tahun 2008-2010 dan monografi desa tahun 2005-2011 diketahui perkembangan pendapatan petani (petani penggarap dan buruh tani) terus menurun dari tahun 2007-2011. Rata-rata penurunan pendapatan petani tersebut sebesar Rp 30.971,- dan Rp 11.284,- per tahun di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo.

Penurunan pendapatan petani di wilayah pinggiran dipengaruhi oleh berkurangnya lahan pertanian sawah dari tahun ke tahun dan beralih fungsi menjadi lahan perumahan yang dibangun oleh *developer*. Kondisi tersebut mendorong petani untuk mencari pekerjaan sampingan atau beralih mata pencaharian

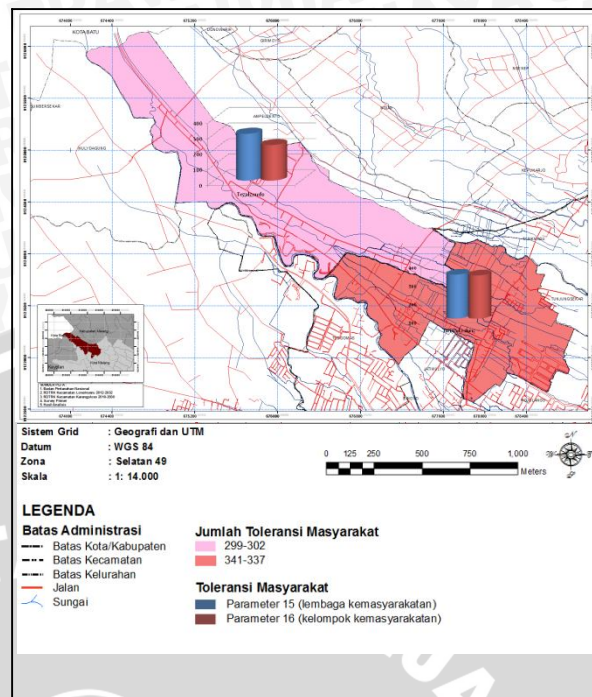
Demikian pula dengan jumlah petani yang terus berkurang dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sebanyak 385 petani di Kelurahan Tunggulwulung dan 182 petani di Desa Tegalondo. Masyarakat wilayah pinggiran yang bermata pencaharian sebagai petani mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebanyak 198 jiwa dan kembali menurun hingga tahun 2011 menjadi 70 jiwa di Kelurahan Tunggulwulung. Berbeda dengan Kelurahan Tunggulwulung, jumlah petani di Desa Tegalondo berkurang sejak tahun 2007-2008, yaitu dari 477 jiwa menjadi 331 jiwa. Jumlah petani di Desa Tegalondo mengalami peningkatan tahun 2008 sebanyak 20 jiwa petani dan kembali menurun hingga tahun 2011 dan menjadi 325 jiwa.

Penurunan jumlah petani disebabkan karena berkurangnya lahan sawah membuat masyarakat yang sebelumnya bermata pencaharian sebagai petani beralih pekerjaan lain seperti menjadi buruh industri, wiraswasta atau tidak bekerja. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pendapatan petani yang semakin menurun sehingga keberadaan lahan sawah harus dipertahankan. Selain itu pemerintah harus memberikan disinsentif pada *developer* dalam pembangunan perumahan yang dapat berupa penyediaan lapangan kerja bagi petani yang kehilangan pekerjaan.

Daya Dukung Sosial wilayah Pinggiran

Berdasarkan hasil survey primer melalui kuisioner diperoleh data mengenai toleransi masyarakat terhadap karakteristik wilayah pinggiran yang menjadi paramater daya dukung sosial. Tingkat toleransi tersebut terdiri dari toleransi 1-4 (tidak dapat diterima-sangat dapat menerima).

Toleransi Kelurahan Tunggulwulung secara keseluruhan tergolong sedang dengan jumlah toleransi 226 dan toleransi Desa Tegalondo secara keseluruhan tergolong rendah dengan jumlah toleransi 191. Toleransi tertinggi adalah toleransi terhadap lembaga kemasyarakatan yaitu mencapai 341 dan toleransi terendah adalah toleransi terhadap konflik sosial yaitu 104.



Gambar 3. Toleransi Masyarakat terhadap Parameter Kelembagaan Sosial

Nilai toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung paling banyak adalah toleransi 1 (tidak dapat menerima), yaitu sebanyak 30%. Sedangkan nilai toleransi paling sedikit adalah toleransi 4 (sangat dapat menerima), yaitu sebanyak 15%. Toleransi masyarakat Desa Tegalondo terhadap 19 parameter daya dukung sosial didominasi oleh toleransi 1 (tidak dapat menerima), yaitu sebanyak 51%. Sedangkan toleransi terkecil adalah toleransi 4 (sangat dapat menerima), yaitu sebanyak 7%.

Tabel 3. Analisis Sebaran Frekuensi Toleransi Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung

Kelas	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	562	0,30
2	496	0,26
3	545	0,29
4	278	0,15
Total	1881	1,00

Sumber: Hasil analisis 2012

Berdasarkan perhitungan sebaran frekuensi toleransi, terlihat bahwa 56% masyarakat tidak dapat menerima atau menolak kondisi eksisting wilayah pinggiran, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya dukung sosial Kelurahan Tunggulwulung adalah rendah dimana 56% masyarakat memiliki toleransi tidak dapat menerima dan kurang dapat menerima kondisi eksisting parameter.

Table 4. Analisis Sebaran Frekuensi Toleransi Masyarakat Desa Tegalondo

Kelas	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	958	0,51
2	235	0,12
3	555	0,30
4	133	0,07
Total	1881	1,00

Sumber: Hasil analisis 2012

Berdasarkan analisis sebaran frekuensi toleransi dapat disimpulkan bahwa daya dukung sosial Desa Tegalondo tergolong rendah dimana 63% toleransi masyarakat terhadap parameter daya dukung sosial adalah toleransi 1 dan 2. Hal tersebut menunjukkan masyarakat lebih menolak kondisi eksisting wilayah pinggiran terkait dengan parameter daya dukung sosial.

Perbedaan Daya Dukung Sosial Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo

Berdasarkan hasil analisis daya dukung sosial diketahui bahwa daya dukung sosial Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo adalah daya dukung rendah. Rendahnya daya dukung sosial di kedua wilayah tersebut dipengaruhi oleh rendahnya toleransi masyarakat terhadap parameter daya dukung sosial yang berbeda-beda. Dengan demikian dilakukan analisis homogenitas untuk menguji perbedaan toleransi antara masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo.

Berdasarkan analisis uji homogenitas dapat disimpulkan bahwa terdapat toleransi yang berbeda antara masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan masyarakat Tegalondo. Perbedaan toleransi antara masyarakat di kedua wilayah disebabkan oleh perbedaan kondisi eksisting. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan yang saling berkebalikan misalnya toleransi tinggi dan rendah dan perbedaan yang tidak saling berkebalikan. Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo yang berbeda tetapi tidak berkebalikan adalah toleransi terhadap kondisi kepadatan bangunan, jumlah penduduk yang kehilangan pekerjaan sebagai petani akibat berkurangnya lahan sawah, konflik pembangunan perumahan *developer*, kelembagaan dan budaya masyarakat pendatang (parameter 3, 11, 13, 15, 16 dan 19). Toleransi yang berbeda dan saling berkebalikan adalah toleransi terhadap kondisi sarana, pelayanan air bersih, pelayanan sampah, tingkat perpindahan penduduk, kepadatan penduduk dan budaya masyarakat lokal yang tidak diikuti masyarakat pendatang (parameter 4, 5, 7, 8, 10 dan 18). Toleransi masyarakat

Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo tidak selalu berbeda, terdapat pula toleransi yang sama antara kedua wilayah tersebut, yaitu toleransi terhadap kondisi penggunaan lahan sawah yang telah dan akan berubah menjadi perumahan *developer*, prasarana sanitasi, laju pertumbuhan penduduk, penurunan pendapatan petani, konflik eksklusifitas dan perbedaan budaya serta budaya masyarakat lokal yang diikuti masyarakat pendatang (parameter 1, 2, 6, 9, 12, 14 dan 17).

Perbedaan toleransi dan daya dukung sosial antara Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo terutama disebabkan oleh perbedaan kondisi sarana, pelayanan sampah, tingkat perpindahan penduduk, jumlah penduduk yang kehilangan pekerjaan sebagai petani akibat berkurangnya lahan sawah, budaya masyarakat lokal yang tidak diikuti masyarakat pendatang, kelembagaan dan budaya masyarakat pendatang. Perbedaan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun rekomendasi terkait daya dukung sosial wilayah pinggiran.

Akar Masalah dan Akar Tujuan

Masalah utama terkait pembangunan perumahan oleh *developer* di wilayah pinggiran adalah daya dukung sosial yang rendah. Daya dukung yang rendah akan berpotensi menimbulkan konflik sosial karena tidak diterima secara sosial oleh masyarakat. Masalah tersebut disebabkan adanya perbedaan budaya antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang yang disebabkan orientasi tindakan atau sikap masyarakat yang berbeda. Masyarakat lokal memiliki orientasi kolektif yang didasarkan pada nilai atau norma sosial sebaliknya masyarakat lokal lebih berorientasi natralis yang didasarkan pada rasionalitas. Perbedaan budaya yang paling berpotensi menimbulkan konflik sosial adalah budaya atau kebiasaan masyarakat pendatang yang berakstifitas hingga lebih dari jam 10 malam sedangkan masyarakat lokal tidak mengijinkan aktifitas lebih dari jam 10 malam. Budaya yang berbeda tersebut seharusnya dapat saling dihormati oleh seluruh masyarakat. Masyarakat lokal dan dan masyarakat pendatang dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah untuk menentukan peraturan terkait jam beraktifitas yang dapat disepakati kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan konflik sosial; adanya eksklusifitas perumahan *developer*. Eksklusifitas tersebut menyebabkan

interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang menjadi terbatas. Selain itu eksklusifitas perumahan yang dibangun *developer* menyebabkan masyarakat pendatang terkesan individualis dan sombong. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan budaya masyarakat yang sangat guyub dan tidak individualis sehingga menyebabkan konflik sosial. Agar tidak terjadi konflik sosial karena eksklusifitas perumahan yang dibangun *developer*, interaksi antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang perlu dipermudah.

Alternatif yang dapat dilakukan untuk mempermudah interaksi antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang adalah melalui kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang

Masalah lain adalah adanya konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun *developer* yang mempengaruhi pendapatan petani karena luas lahan sawah yang terus berkurang menyebabkan hasil produksi berkurang sehingga pendapatan petani juga berkurang. Selain itu berkurangnya lahan sawah juga menyebabkan pemilik lahan hanya mempekerjakan sedikit petani sehingga banyak petani yang kehilangan pekerjaan atau beralih menjadi buruh.

Konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun oleh *developer* dapat dihindari dengan peraturan yang tegas terkait konservasi lahan pertanian. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan disinsentif pada *developer* yang akan membangun perumahan di wilayah pinggiran dengan mengharuskan *developer* menyediakan lahan sawah pengganti maupun lapangan pekerjaan baru bagi petani yang mungkin akan kehilangan pekerjaan dengan adanya pembangunan perumahan oleh *developer* tersebut

Kurangnya prasarana pengolahan limbah juga menjadi masalah di wilayah pinggiran. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki prasarana pengolahan limbah menyebabkan kondisi lingkungan buruk karena masyarakat membuang limbah langsung ke sungai. Perbaikan kondisi lingkungan dapat dilakukan dengan pengadaan prasarana *septic tank* dan TPL. Selain itu pelayanan petugas kebersihan tidak merata di Desa Tegalondo karena hanya menjangkau sebagian wilayah Desa Tegalondo menyebabkan masyarakat lokal yang tidak terlayani petugas kebersihan membuang sampah langsung ke sungai atau dibakar. Hal

tersebut memperburuk kondisi lingkungan permukiman masyarakat lokal dan banyak tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Masalah lainnya adalah adanya pembatasan akses sarana olahraga oleh masyarakat pendatang terhadap masyarakat lokal Desa Tegalondo yang menimbulkan konflik sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal Desa Tegalondo. Oleh karena itu untuk menghindari konflik kembali terjadi maka diperlukan suatu pengaturan penggunaan sarana olahraga maupun sarana umum lainnya.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis deskriptif dan evaluatif mengenai kondisi eksisting dan daya dukung wilayah pinggiran serta analisis akar masalah dan akar tujuan, maka dapat dibuat beberapa rekomendasi sebagai alternatif penyelesaian masalah di wilayah pinggiran sebagai.

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait toleransi masyarakat terhadap kondisi prasarana sampah yang rendah adalah melalui pemerataan pelayanan prasarana sampah dengan pengadaan tempat sampah individu maupun komunal dan memperluas pelayanan petugas kebersihan hingga menjangkau seluruh wilayah di Desa Tegalondo. Pengadaan tempat sampah dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat atau dilakukan oleh *developer* sebagai bentuk komitmen dalam membangun perumahan tanpa mengabaikan perumahan lokal yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di dalam masyarakat yang secara langsung dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Selain itu perlu dilakukan pemerataan prasarana sanitasi melalui pembuatan TPL maupun *septic tank* individu dan komunal untuk seluruh wilayah di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo. Pembuatan TPL dan *septic tank* dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat atau dilakukan oleh *developer* sebagai bentuk komitmen dalam membangun perumahan tanpa mengabaikan perumahan lokal yang sudah ada. Pemerataan prasarana sanitasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas prasarana sanitasi sehingga toleransi masyarakat terhadap kondisi prasarana sanitasi tersebut juga dapat meningkat. Pemerataan prasarana sanitasi ini perlu dilakukan agar tidak terjadi

kecemburuan sosial yang secara langsung dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengatasi konflik aksesibilitas sarana adalah melalui pengaturan kegiatan yang memanfaatkan sarana olahraga di Dusun Tegalgondo agar dapat diakses seluruh masyarakat tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat pendatang. Pengaturan kegiatan yang menggunakan setiap sarana umum di Desa Tegalgondo harus dilakukan dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh pengaturan tersebut. Pengaturan tersebut dapat berupa pengaturan terkait waktu, bentuk kegiatan dan skala kegiatan yang memanfaatkan sarana olahraga maupun sarana umum lainnya. Pengaturan kegiatan yang memanfaatkan sarana umum perlu dilakukan karena toleransi masyarakat terhadap kondisi akses sarana tersebut rendah yang menyebabkan konflik sosial antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Melalui pengaturan ini diharapkan seluruh masyarakat dapat mengakses sarana olahraga maupun sarana umum lainnya tanpa mengganggu pihak-pihak tertentu. Dengan demikian maka akan tercipta lingkungan kondusif tanpa adanya konflik sosial yang sekaligus dapat meningkatkan toleransi masyarakat terhadap kondisi akses sarana.

Pengaturan lainnya adalah pengaturan jam beraktifitas yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo agar tidak terjadi konflik sosial karena perbedaan budaya. Pengaturan jam beraktifitas ini penting dilakukan karena perbedaan budaya antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang didasari oleh orientasi sikap masyarakat yang berbeda sehingga memicu terjadinya konflik sosial dan menyebabkan toleransi masyarakat terhadap kondisi tersebut rendah. Oleh karena itu dengan adanya pengaturan ini diharapkan seluruh masyarakat dapat beraktifitas tanpa saling terganggu. Pengaturan dapat didasarkan pada musyawarah seluruh masyarakat sehingga dapat dicapai kesepakatan terkait perbedaan budaya tersebut. Selain itu masyarakat harus dapat lebih menghormati perbedaan budaya yang ada di dalam sistem sosial wilayah pinggiran dan mempererat hubungan dan interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial;

Pemberian disinsentif pada *adeveloper* yang akan mengkonversi lahan sawah menjadi perumahan di wilayah pinggiran. pemberian disinsentif menjadi hal penting yang perlu dilakukan untuk mencegah konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun oleh *developer*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konversi lahan sawah menjadi perumahan menyebabkan pendapatan petani dan jumlah petani terus menurun sehingga menimbulkan berbagai konflik sosial sekaligus menyebabkan toleransi masyarakat terhadap konversi lahan sawah menjadi perumahan sangat rendah. Disinsentif yang dapat diberikan kepada *developer* dengan mengharuskan *developer* membuat desain perumahan yang tidak membatasi interaksi masyarakat pendatang dan masyarakat lokal sehingga tidak menimbulkan eksklusifitas perumahan, menyediakan sarana dan prasarana permukiman seperti prasarana sampah dan sanitasi baik di perumahan yang dibangun *developer* maupun perumahan yang dibangun swadaya oleh masyarakat lokal agar tidak terjadi kecemburuan sosial serta menyediakan lahan pengganti sawah yang telah dikonversi sekaligus lapangan kerja baru bagi petani yang berpotensi kehilangan pekerjaan karena adanya konversi lahan sawah menjadi perumahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab 4 maka dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun perumahan yang dibangun *developer* mencapai luas 26,96 Ha di Kelurahan Tunggulwulung dan 10,33 Ha di Desa Tegalgondo. Daya dukung sosial masyarakat Kelurahan Tunggulwulung terhadap pembangunan perumahan oleh *developer* adalah kategori rendah dengan 51% masyarakat menolak kondisi parameter daya dukung sosial dan daya dukung sosial Desa Tegalgondo adalah kategori rendah dengan 63% masyarakat menolak kondisi parameter daya dukung sosial. Perbedaan toleransi terutama ditunjukkan oleh toleransi terhadap parameter kondisi sarana. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pemerataan pelayanan prasarana sampah melalui pengadaan tempat sampah individu maupun komunal dan memperluas pelayanan petugas kebersihan hingga menjangkau seluruh dusun di Desa Tegalgondo; pemerataan pelayanan sanitasi melalui pembuatan TPL

maupun *septic tank* individu dan komunal untuk seluruh wilayah di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo; pengaturan kegiatan yang memanfaatkan sarana olahraga di Dusun Tegalondo agar dapat diakses seluruh masyarakat tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat pendatang; pengaturan jam beraktifitas yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo agar terjadi konflik sosial karena perbedaan budaya; pemberian disinsentif pada *developer* yang akan mengkonversi lahan sawah menjadi perumahan di wilayah pinggiran dengan mengharuskan *developer* membuat desain perumahan yang tidak membatasi interaksi masyarakat pendatang dan masyarakat lokal, menyediakan sarana dan prasarana permukiman seperti sarana umum maupun prasarana sampah dan sanitasi serta menyediakan lahan pengganti sawah yang telah dikonversi sekaligus lapangan kerja baru bagi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Peyton, R. B., Bull. P. A., Holsman, R. H. 2007. *Measuring the sosial carrying capacity for gray wolves in Michigan*. http://www.michigan.gov/documents/dnr/Peyton_et_al_SCC_wolves_PDF_for_online_295701_7.pdf (diakses 3 September 2011).
- Roussel, V. & Valette, H. 2007. *On Coastal Zone Sosial Carrying Capacity*. Montpellier: Department of Economics, LASER-CEP, University of Montpellier. http://www.encora.corila.it/Events/Conference/session4/roussel_paper.pdf (diakses 23 September 2011).
- Savariades. 2000. Estlabishing The Sosial Tourism Carrying Capacity for The Tourist Resort of The East Coast of The Replubic of Cyrus. *Journal of Tourism and Management*. 11 (2): 269-291.
- Thaizong, G., Giunying, Z., Liu, Y. 2011. Analysis and Countermeasures on City Comprehensive Carrying Capacity and Sustainable Development in Hebei Province, China. *Journal Saince and Technology of Heibei*. <http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/201005/2010qyjhy03a22.pdf> (diakses 29 September 2011).

